

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Syarief & Andrew Hariyoga. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru (Tarif Efektif Rata rata (TER)) pada PT. Medcalindo Jakarta. *International Journal of Halal Economic*, 1(1), 57-67.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income tax evasion: A theoretical analysis*. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323–338.
- Aryani, Farida & Candra Romanda. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7(2), 221-240.
- Cahyanti, Andi Amelia. (2024). Persepsi Wajib Pajak Atas Pelaksanaan UU HPP Tahun 2021 di Kota Makassar Studi Kasus Dosen FEB Unismuh Makassar. Skripsi. Diakses melalui: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39039-Full_Text.pdf.
- Dharmawan, N. A. S., Astawa, I. G. P. B., & Chiva, K. (2021). *The Meaning of Tax for Gen-Z A Study on Non-Economic Faculty Students at Ganesha University of Education*. *Proceedings of the 6th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2021)*, 197(Teams), 551–554.
- Fannis. (2024). PPh 21 TER: Langkah Signifikan Menuju Keadilan Pajak. Diakses melalui: <https://www.pajak.com>.
- Faradina, T. (2007). Pengaruh Persepsi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). *The Role of Tax Literacy on Economics Undergraduated Students' Tax Awareness*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 111-127.
- Hertina. (2018). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Skripsi. Diakses melalui: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4877-Full_Text.pdf.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Tumbuh Positif, Menteri Keuangan Laporkan Total Penerimaan Negara Hingga Juli 2024 Capai Rp 1.545,4 Tirlun. Diakses melalui: <https://www.kemenkeu.go.id>.

- Kirchler, dkk. (2008). *Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Marziana, M., dkk. (2010). *Perceptions of Taxpayers with Level of Compliance: A Comparison in the East Coast Region*. *Journal of Global Business and Economics*, 1(1), 241–257.
- Miles, Mathew B. & A. Michael Huberman. (1994). *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publications.
- Nafirin, Achmad. (2022). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Atas Pegawai Tetap di Sekolah Dasar Negeri 013 Tanjung Redeb. Skripsi. Diakses melalui: [http://repository.umberau.ac.id/57/1/SKRPSI%20Achmad%20Nafirin%20\(17120004\).pdf](http://repository.umberau.ac.id/57/1/SKRPSI%20Achmad%20Nafirin%20(17120004).pdf).
- Parhusip, Kevin Parningotan. (2024). Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang PPh 21 Tarif Efektif Rata-Rata (Studi Kasus PT Trinitax). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital (JEBD)*, 02(1), 532-539.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ramahani, A. N., dkk. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Varuna Tirta Prakasya Cabang Palembang. *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, 4(4), 9796-9806.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023a). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas

Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- Republik Indonesia. (2023b). Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Rizkia, Alviatri. (2024). Analisis Perhitungan PPh 21 PT FIFGROUP Yogyakarta Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(10), 509-525.
- Robbins, S.P. (1999). *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. Prentice Hall.
- Santioso, L., dkk. (2024). Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754-765.
- Sarwono, S.W. (1983). *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teorinya*. Rajawali Press.
- Schramm, W. (1954). *The process and effects of communication*. Urbana, IL: University of Illinois Press.
- Setiawan, Teguh. (2019). Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *IJSSB: International Journal of Social Science and Business*, 3(4), 463-472.
- Siagian, S.P. (1989). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumali, Catherine & Setiadi Alim Lim. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16(2), 119-136.
- Suryo, W.F. (2024). Simak Yuk Ketentuan Terbaru Perhitungan PPh Pasal 21. *Netral News*. <https://www.netralnews.com/simak-yuk-ketentuan-terbaru-perhitungan-pph-pasal-21/>.
- Thoha, M. (1999). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Press.

- Vallentino, Putu Wahyu Aditya & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Metode Gross Up Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. *COSTING : Journal of Economic, Business, and Accounting*, 7(4), 8916-8923.
- Wahyuni, M. A., dkk. (2019). *The Examination of Tax Evasion Behavior of Tax Payers from The Perspective of Planned Behavior Theory*. 3rd International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018), 69(3), 45–51. <https://doi.org/10.2991/teams-18.2019.9>
- Wenzel, M. (2005). *Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and tax compliance*. *Journal of Economic Psychology*, 26(4), 491–508.
- Wibowo, H. (2023). Dampak Perubahan Kebijakan Pajak terhadap Karyawan: Perspektif Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(2), 134-146.
- Yasa, I.N.P., Artini, N.M.A.S.P., Astari, L.M. & Sari, N.P.P. (2021). Mengungkap Persepsi Wajib Pajak Atas Pendampingan Relawan Pajak. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 14(1), 73-81.
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H. & Herawati, N. T. (2021). *Tax Comprehension and Ethics Education Integration in Improving Tax Compliance Among Accounting Students*. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 10(1), 96–108.
- Yasa, I.N.P., Kesawa, A.P. & Dewi, N.M.P. (2020). Kepatuhan Memediasi Pengaruh Kesadaran, Reformasi dan Persepsi atas Sanksi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 106-129.
- Yasa, I.N.P., Sujana, E. & Andriawan, I.G.D. (2019). Persepsi Wajib Pajak atas Program *Tax Amnesty* dalam Perspektif Budaya *Meboya*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 66-87.